

Partai Politik Islam di Nusantara

Hairil Anwar

Universitas Islam negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
e-mail: hairil@gmail.com

Abstract: In its history, Indonesia was once a political power that counted in the world. It was marked by the birth of political forces during the Hindu-Buddhist kingdoms to Islamic sultanates. Ironically, the final phase of the power of political Islam began to decline since the arrival of colonialism, especially the Dutch colonizers who fundamentally colonized in a period of 350 years. However, this did not necessarily stop political Islam from growing and developing in the archipelago. Even since Indonesia's independence until it changed into the three regimes of the Old Order, New Order and reformation, political Islam has remained a barometer of political power in Indonesia. This article aims to analyze the dynamics of the development of political Islam in Indonesia. It can be classified into two phases, namely the "traditional-kingdom" phase and the modern phase. From the results of this study, there are at least two patterns of development of the power of political Islam in Indonesia, which in fact can survive despite facing the "pressure" of the authorities, namely, in the political and cultural fields.

Keywords: Islamic Party, History, Political Islam, Archipelago.

Pendahuluan

Fenomena pembangunan politik dan ekonomi sangat disadari oleh the founding father bangsa Indonesia. Karena itu desain pembangunan politik pertama kali adalah *unity in diversity* (bhinneka tunggal ika). Mengapa demikian? Mereka sadar bahwa *unity in diversity* adalah jalan menuju posisi MDP. Relasi-relasi etnisitas dan religiusitas untuk yang pertama kali harus dibangun, sebagai landasan menuju tumbuhnya demokrasi.(Joebagio 2016) Islam dan politik adalah sebuah keterpaduan yang saling mengikat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Para pakar politik Barat mengakui tentang integrasi keduanya, seperti Dr. V. Fitzgerald, ia berkata, “Islam bukanlah semata agama (a religion), namun juga merupakan sebuah sistem politik (a political system). Meskipun dekadedekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis, yang berusaha memisahkan sisi itu, namun seluruh gagasan pemikiran Islam dibangun di atas fundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Usaha Rasulullah memperkenalkan agama dan hukum baru melabelkan sebuah identitas sosial yang mengikat seluruh anggotanya, menumbuhkan universalitas yang membentengi mereka dari kekuatan luar. Keberhasilan hukum Islam mewujudkan semua itu sebagian karena ajaran Islam meliputi seluruh aspek perilaku, bahkan seringkali dengan gambaran yang sangat mendetail. Syariat menggantikan adat-adat kesukuan seraya tetap mempertahankan semangat kelompok dalam praktik kehidupan antarpersonal.(Ramlan Surbakti 2010)

Rasulullah mengubah kesukuan masyarakat Arab yang chauvinisme menjadi nasionalisme, mengubah tradisi yang politheisme menjadi monotheisme. Transisi ini tidak lepas dari praktik teokrasi yang diterapkan Rasulullah, serta menjadikan syariat sebagai kerangka struktur masyarakat Islam yang sampai tingkatan tertentu, didasarkan pada tatanan hukum yang bersifat nomokratik.(M.Ikhwan 2021)

Hal inilah yang pada akhirnya turut mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan politik Islam di Nusantara. Indonesia yang mula-mula merupakan basis dari kekuatan Hindu-Budha lambat laun menjadi pusat perkembangan dari teritori kekuasaan Islam, hal ini ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam sebagai manifestasi atas pembasisan kekuatan politik, selain itu berdirinya

kerajaan tersebut dapat mengungguli kawasan dunia lainnya yang selama berabad-abad menjadi patronase kesuksesan ekspansi Islam. Kekuatan politik Islam Nusantara mengalami masa suram saat kehadiran para penjajah dari Barat. Dimulai dengan munculnya Portugis, Inggris, dan Belanda semuanya menutup akses institusi politik Islam untuk mengembangkan diri, meskipun banyak terjadi perlawanan-perlawanan baik dari para sultan, kaum bangsawan, ulama hingga rakyat jelata. Akan tetapi tetap saja institusi politik Islam terbelenggu dalam jerat kolonialism.

Pada masa kemerdekaan (tepatnya masa Orde Lama dan Orde Baru) sepertinya tidak terlalu berpengaruh terhadap perkembangan Islam politik. Paham nasionalis mampu mengalahkan ide keislaman, sehingga pada masa ini Islam menjadi lemah di tengah jumlah penganutnya yang mayoritas. Sentralnya kepemimpinan Indonesia dengan menjadikan militer sebagai basis kekuatan politik membuat posisi Islam terjepit untuk mengembangkan peradabannya, masa ini hanya terjadi sedikit resistensi dari kekuatan Islam politik. (Dhiauddin Rais 2001) Partai politik adalah salah satu organisasi atau lembaga yang tidak terlepas dari proses perencanaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkannya. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil. (Armansyah 2017)

Metode

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Merupakan rangkaian penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya diperoleh melalui berbagai macam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen)

Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) merupakan sebuah kajian penelitian yang meneliti atau meninjau secara kritis pengetahuan, ide, atau penemuan yang berada dalam literatur yang berorientasi

akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Fokus penelitian kepustakaan yaitu menemukan teori-teori, hukum, dalil, prinsip, atau ide-ide yang dipakai untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan bukan dari pengamatan langsung. Melainkan data yang didapatkan melalui hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder yang dimaksud yaitu berupa buku dan laporan ilmiah primer atau asli yang terdapat pada artikel atau jurnal (tercetak dan/atau non-cetak) berkenaan dengan sejarah matematika dan peletakannya dalam aktivitas pembelajaran (The UCSC University Library).

Pembahasan

Partai Politik Pertama di Nusantara

Islam Nusantara telah membentuk institusi politik paling awal pada abad XIII. Namun, institusi politik di beberapa daerah tidaklah sama. Di Sumatera, ada beberapa di antaranya yang telah mengalami perkembangan dalam abad XIV atau abad XV. Abad ke XVI telah menjadi saksi munculnya kerajaan-kerajaan baru di medan sejarah, terutama di Jawa. Sebagian besar kerajaan-kerajaan itu lazim disebut kerajaan Islam, sedangkan beberapa daerah di pedalaman masih bersifat Hindu. Perkembangan kerajaan Islam di daerah Maluku, Sulawesi Selatan, dan di daerah lain mulai juga tampak pada abad ke XVI. Sementara itu masih terdapat kerajaan-kerajaan yang terus eksis dengan memakai sistem tradisional pra-Islam, (Sartono Kartodirdjo 1992) seperti kerajaan Mataram di Jawa. Dalam hal ini kerajaan Islam umumnya berdiri setelah jatuhnya kerajaan Hindu-Budha. Sehingga membuat Islam pada saat itu menjadi satu-satunya basis kekuatan politik. Kekuatan pertama kekuasaan Islam terletak di kota Samudera. Daerah ini kemudian terkenal dengan sebutan Pasai. Kota ini tidak berapa lama menjadi sebuah kerajaan yang kuat.

Setelah Islam dapat diterima oleh penduduk setempat dan menemukan pijakannya yang kokoh dikota itu. Samudera Pasai selanjutnya merupakan bagian dari wilayah Aceh. Aceh sendiri menerima pengislaman dari Pasai pada pertengahan

abad XVI, kerajaan Aceh bermula dari penggabungan dua negeri kecil, Lamuri dan Aceh Dar al-Kamal pada abad ke-10 H/XVI M.(Nor Huda 2007) Di Jawa, kerajaan Demak (1518-1550 M) dipandang sebagai kerajaan Islam pertama dan terbesar di Jawa. Kerajaan ini berdiri setelah kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan pada 1527 M. Menurut tradisi Jawa Barat (sejarah Banten), konfrontasi antara Demak dan Majapahit berlangsung beberapa tahun. Dua kekuatan yang berhadapan adalah antara barisan Islam Demak, yaitu para ulama dari Kudus, imam Masjid Demak, di bawah pimpinan Pangeran Ngudung, melawan Majapahit yang dibantu vasal-vasalnya dari Klungkung, Pengging, dan Terung.

Reposisi perubahan pusat kekuasaan Islam terjadi setelah berdirinya kerajaan Pajang pada akhir abad XVI. Di mana, pusat kekuasaannya terletak di daerah pedalaman dan lebih bersifat agraris. Dengan berdirinya kerajaan Pajang ini maka berakhir dominasi kerajaan-kerajaan pantai dalam politik Islam di Jawa. Daerah pedalaman ini kurang begitu terlibat dalam perdagangan laut dan tidak begitu mudah ditembus oleh pengaruh Islam dari luar. Di wilayah Indonesia Timur muncul kerajaan-kerajaan di Maluku, Makasar, Banjarmasin, dan sebagainya. Pada permulaan abad ke XVI, kerajaan Ternate mulai maju karena berkembangnya perdagangan rempah-rempah. Aktivitas perdagangan ini dijalankan oleh orang-orang Jawa dan Melayu yang datang ke Maluku, khususnya Ternate dan Tidore, perdagangan ini bertambah ramai setelah kedatangan para pedagang Arab.(Nor Huda 2007)

Hubungan antar kerajaan-kerajaan Nusantara juga terlihat dalam berbagai kesempatan dibidang politik, contohnya persekutuan antara Demak dengan Cirebon dalam menaklukkan Banten dan Sunda Kelapa, persekutuan kerajaan-kerajaan Islam dalam menghadapi Portugis dan Belanda yang berusaha memonopoli pelayaran dan perdagangan.(Yatim 2007) Jaringan komunikasi yang terbangun antara kerajaan Islam telah tercapai dengan sangat erat sehingga dalam beberapa periode lamanya kerajaan Islam dapat terus eksis hingga kehadiran para penjajah Barat. Dalam pembahasan ini akan dibahas mengenai masa kemunduran kerajaan Islam dan kondisi Nusantara yang terjajah. Dimana, deskripsinya terlihat dari keadaan kerajaan-kerajaan Islam menjelang datangnya Belanda di akhir abad-16 M dan awal abad-17 M ke Indonesia yang berbeda-beda, bukan hanya berkenaan

dengan kemajuan politik, tetapi juga proses Islamisasinya. Di Sumatera, penduduknya sudah Islam sekitar tiga abad, semetara di Maluku dan Sulawesi proses Islamisasi baru saja berlangsung.(Yatim 2007)

Dapat dikatakan masa kolonialisme menjadi fase berakhirnya dominasi politik Islam. Meskipun ada beberapa daerah yang tetap kuat mempertahankan diri dari serangan penjajah, namun superioritas Belanda menjadi semakin dominan dalam berbagai bidang. Hanya Sumatera yang diwakili oleh Aceh dan Sumatera Barat, yang mampu bertahan beberapa tahun lamanya untuk tidak dijajah. Selebihnya, kerajaan-kerajaan dan institusi Islam hampir pasti semua tunduk terhadap Belanda. Diawali dengan kehadiran orang-orang Portugis ke Indonesia dengan motif agama, ekonomi, dan pertualangan, mulai mengusik kerajaan Islam di Indonesia.(Marwati Djoned Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto 2019) Walaupun demikian banyak kerajaan-kerajaan Islam dapat mengatasi orang-orang Portugis, karena bangsa Portugis hanya mempunyai sedikit pengaruh terhadap kebudayaan Nusantara yang bersendikan Islam. Kehadiran orang-orang Belanda di Indonesia juga sangat mengancam institusi perpolitikan umat Islam. Ancaman ini terlihat manakala keinginan memonopoli perdagangan timbul, orang-orang Belanda pun mulai mengintervensi institusi perpolitikan Islam yang pada umumnya tidak stabil. Pada Maret 1602, Belanda mendirikan VOC (Verrenigde Oost-Indische Compagnie) atau perserikatan Maskapai Hindia-Timur untuk menyaingi pelayaran dan perdagangan orang-orang Barat lainnya. Dengan politik “belah bambu” satu demi satu kerajaan Islam hancur. Apabila kerajaan itu masih berdiri. Maka hegemoni dan pengaruh VOC cukup kuat disana. Karenanya kerajaan itu hanya sebagai bayangan dari VOC.(Nor Huda 2007) Namun, setidaknya ada empat usaha perjuangan umat Islam dalam mengusir kolonialisme Belanda: Pertama, perlawanan dan pertentangan yang dilakukan oleh para Sultan. Pada masa ini para Sultan telah berusaha keras mempertahankan kepentingan ekonomi dan politik dari pengaruh Belanda. Kedua, perlawanan kaum bangsawan yang memandang kekuasaan sultan semakin lemah akibat hegemoni Belanda. Ketiga, perjuangan para ulama menentang kekuasaan asing. Keempat, gerakan protes rakyat. Dari keempat jalur perjuangan fase ini, terlihat kekuatan para sultan masih dominan memimpin perjuangan dari intervensi penjajah. Pada tahun 1755 VOC berhasil menjadi pemegang hegemoni politik

pulau Jawa dengan perjanjian Giyanti, karena itu raja Jawa kehilangan kekuasaan politiknya. Bahkan, kewibawaan raja sangat bergantung kepada VOC. Campur tangan kolonial terhadap kehidupan keraton makin meluas, sehingga ulama-ulama keraton sebagai penasihat raja-raja tersingkir. Akibat menyempitnya kekuasaan para raja Islam akibat kekuasaan Belanda, maka kekuatan politik berpindah dari istana, salah satunya ke pesantren-pesantren yang kemudian menjadi basis perlawanan dengan dipimpin oleh para ulama.(Musrifah Sunanto 2010)

Munculnya ulama tidak lepas dari kapasitasnya sebagai satu-satunya komunitas independen baik secara otoritas, jumlah dan pengaruhnya yang luas. Hal ini tercermin pada saat mereka melaksanakan ibadah haji ke Mekah dan pengembaraan studi agama yang luas di Arab yang telah mengantarkan kontak dunia Muslim Melayu dan Indonesia dengan ajaran-ajaran reformis, meningkatkan kesadaran mereka terhadap identitas Muslim dan menjadikan mereka mengenal perlawanan dunia Muslim terhadap kolonialisme Eropa.(Ira M. Lapidus 2000)

Beberapa gerakan politik dalam rangka mengusir Belanda dari Nusantara yang dipelopori para ulama, diantaranya yang termasyhur adalah perang Paderi (1821-1837 M) di Minangkabau dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol, perang Jawa (1825-1830 M) yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro didampingi Kiai Mojo13, perang Banjarmasin (1857 - 1905 M) dan perang Aceh (1873 - 1904 M) yang dipimpin oleh Panglima Polim dengan sebelas orang ulama Aceh. Para ulama tersebut menjadi konduktor perjuangan dengan memobilisasi massa Islam untuk mempertahankan tanah airnya dari penjajahan. Lambat tapi pasti muncul kesadaran dari umat Islam untuk merubah bentuk perlawanan terhadap Belanda yang selama ini dilakukan dengan konfrontasi fisik.

Trend baru perjuangan dengan organisasi menjadi pilihan strategis dimana banyak terdapat ruang yang bisa dimaksimalkan menjadi sebuah kekuatan. Bidang sosial dan pendidikan menjadi pilihan ideal kala itu sehingga dalam perkembangannya organisasi tersebut dapat menyatukan basis kekuatan massa baik di daerah maupun Nusantara secara luas seperti organisasi Sumatra Thawalib dan Syarikat Islam. Demikian juga K.H. Ahmad Dahlan di Jawa dengan gerakan Muhammadiyah dan K.H. Hasyim Asy'ari dengan gerakan Nahdhalatul Ulama.

Sebenarnya ide seperti ini timbul dari kalangan yang terpelajar yang pernah dididik di negeri Belanda. Sementara itu pendidikan Barat pada akhirnya melahirkan golongan nasionalis sekuler. Golongan ini bertemu dengan golongan Islam dengan rasa nasional, kemudian saling bahu membahu dalam memperjuangkan pembebasan tanah air mereka bersama, meskipun terjadi persaingan ketat antar keduanya. (Taufik Abdullah 1991) Dengan kata lain abad 20 banyak melahirkan berbagai pergerakan Nusantara yang lebih modern, perubahan sosial yang terjadi selama ini menggunakan kekuatan fisik dalam menghadapi penjajah tidak menjadi trend topik. Ide pergerakan melalui organisasi menjadi jawaban yang harus dipilih dan ternyata sangat tepat.

Syarikat Islam sendiri dilahirkan di Solo pada tanggal 16 Oktober 1905 dengan sifat nasional dan dasar Islam yang tangguh. SI adalah organisasi Islam yang terpanjang dan tertua umurnya dari semua organisasi massa di tanah air. Sifat nasional itu untuk membedakannya dengan regional, lokal kedaerahan seperti yang dianut oleh Budi Utomo. Dengan sifat nasionalnya itu, Syarikat Islam meliputi seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Lihatlah para tokohnya seperti Samanhudi, Cokroaminoto berasal dari Jawa Tengah dan Timur. Agus Salim dan Abdoel Moeis berasal dari Sumatera Barat, dan A.M. Sangadji dari Maluku. Lebih lanjut Firdaus A.N menyatakan bahwa sebenarnya Syarikat Islamlah yang pertama dan berperan besar dalam menyatukan bangsa Indonesia bukan organisasi Budi Utomo. Hal ini (Firdaus, A.N 1997) dapat dilihat dari komentar dari Hamid Algadri, Ketua Perintis Kemerdekaan Indonesia dalam wawancaranya dengan Republika tentang Budi Utomo yang menyatakan seperti ini: “Sebetulnya ketika Budi Utomo berdiri kita akan tahu mereka murid-murid Belanda yang tidak tahu banyak tentang sejarah Islam. Bahkan pergerakan nasionalis mula-mula itu anti Islam dan anti Arab”.

Berdirinya Syarikat Islam sebenarnya menunjukkan eksistensi umat Islam dan sangat wajar apabila organisasi ini dapat berperan sampai sejauh itu karena berbagai basis kekuatan politik Indonesia adalah umat Islam itu sendiri yang tersebar di berbagai pelosok Nusantara. Langkah ini dapat menemukan akomodasinya ketika pada saat itu umat Islam tidak memiliki wadah perjuangan

yang terorganisir dengan baik. Syarikat Islam menjadi jawaban atas problematika penindasan kaum penjajah. Dari organisasi ini akhirnya lahir Serikat Dagang Indonesia (SDI) yang lahir di Solo pada 1911. Organisasi dagang ini merupakan usaha untuk menandingi dominasi pengusaha Tionghoa yang memiliki kedekatan dengan pemerintah Hindia Belanda. (Abdul Karim 2005)

Perkembangan Partai Politik Islam: Dari Era Orde Lama Sampai Era Reformasi. Politik ialah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. (Salim Ali al-Bahnasawi 2002) Oleh karenanya politik Islam masa Orde Lama dan Orde Baru lebih mengasosiasikan diri dalam aturan yang lebih struktural, hal ini akibat dari konsekuensi logis menerima sistem demokrasi yang ditawarkan Barat, hal lainnya karena demokrasi dianggap sebagai pilihan realistis ditengah bangsa yang plural. Masa Orde Lama terjadi ketidakstabilan politik, banyak terjadi pertentangan yang muncul. Partai-partai politik di parlemen tidak mampu bekerjasama untuk membentuk satu sistem politik yang kuat termasuk partai Islam. Saat itu partai politik yang paling terkenal dalam menegakkan kemerdekaan berpikir ialah Masyumi (Madjilis Sjura Muslim Indonesia). Tokoh-tokoh di kalangan Masyumi ini sebagian keluaran dari al-Azhar dan Kairo University yang banyak membaca bukubuku terbitan Mesir, sehingga pola pemikirannya dipengaruhi oleh Revolusi Perancis.

Eksistensi Masyumi sebagai partai besar yang menjadi satu-satunya wadah politik umat Islam Indonesia tidak menemukan tempatnya manakala pemerintahan yang dibangun Kabinet Sjahrir pada 14 November 1945 tidak mengakomodasi para menteri yang mewakili kalangan politisi Muslim, terhitung hanya H. Rasjidi (Menteri Negara) dan kemudian pada 3 Januari 1946 M. Natsir (Menteri Penerangan) akan tetapi keduanya diangkat menjadi menteri dalam kapasitasnya sebagai pribadi, bukan Masyumi. (Bakhtiar Effendi 1998) Masa Orde Baru ditandai dengan pengalihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto pada 1968. Pemilu kedua sejak Indonesia merdeka akhirnya dilaksanakan pada 1971, rezim Soeharto tidak memberikan tempat kepada sebagian partai atau politisi yang telah mendapat kedudukan penting pada masa Presiden Soekarno. Uniknya baik Presiden Soekarno

maupun Presiden Soeharto memandang partai-partai politik yang berlandaskan Islam sebagai pesaing kekuasaan yang potensial, yang dapat merobohkan landasan negara nasionalis. Atas dasar inilah sepanjang lebih dari empat dekade, kedua pemimpin tersebut berupaya untuk melemahkan dan “menjinakkan” partai-partai Islam.

Era reformasi banyak melahirkan partai Islam atau partai yang berbasis dukungan massa Islam, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Umat Islam (PUI), Partai Masyumi Baru, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), Partai Nahdhatul Ummat (PNU), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan yang lainnya. Reformasi seakan menjadi “napas baru” bagi perkembangan sosial, hukum, kebebasan pers dan politik di Indonesia. Begitu juga dengan kelahiran partai-partai Islam. Namun, ada sebuah keironian ketika munculnya partai-partai Islam yang tumbuh “bagaikan jamur di musim hujan” hal ini terkesan menimbulkan watak oportunist dari parpol Islam yang seakan “bersaing” menjadikan partainya sebagai alternatif tunggal dalam mengisi posisi kepemimpinan pasca ditinggal Soeharto.

Masa reformasi juga membuat para ulama terpolarisasi sedemikian rupa. Misalnya, kampanye Pemilu 1999, diwarnai dengan menghamburnya para Kiai untuk membela partai politiknya masing-masing sesuai dengan “keulamaan” mereka. Ulama-ulama NU terdapat di partai PKB, yang merupakan satu-satunya partai yang diresmikan PBNU. Secara individu, para Kiai NU mendirikan partai-partai seperti PKU yang didirikan K.H. Yusuf Hasyim, PNU oleh K.H. Syukron Makmun dan yang terpenting tentu PPP yang banyak didukung ulama NU seperti K.H. Alawi Muhammad, K.H. Maimun Zubair, serta kebanyakan ulama Betawi yang sangat berpengaruh pada kemenangan PPP di Jakarta. (Hatamarrasyid 2008) Lebih lanjut ulama yang berasal dari Muhammadiyah dan generasi muda Masyumi juga turut andil dalam pembentukan partai. Mereka tergabung dalam PAN dan PBB. Pendukung PAN lebih banyak berasal dari Muhammadiyah, sedangkan PBB ingin membangkitkan kembali perjuangan Masyumi. Para mahasiswa dan halaqah kampus turut mendirikan partai Islam yaitu, partai keadilan (belakangan menjadi PKS) yang menarik sebagian ulama alumnus Timur Tengah. Belakangan

PKB dan PAN menyatakan diri sebagai partai yang berasaskan Pancasila dan bersifat nasionalis, tetapi pendukung suaranya berasal dari massa Islam. Fenomena maraknya partai Islam dan partai berbasis dukungan umat Islam merupakan refleksi dari kemajemukan umat Islam dan keragaman kepentingan kelompok Islam. Kelahiran partai-partai tersebut merupakan buah euforia politik yang tidak terelakkan dari proses reformasi. Lahirnya reformasi memang memberikan angin segar bagi kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkelompok yang selama 30 tahun telah terkungkung oleh kekuasaan absolut sentralistik.

Analisis Kekuatan Partai Politik Islam di Masa Depan

Indonesia memiliki sejarah dan tradisi panjang pergerakan sosial, terutama dalam perjuangan kemerdekaan. Bahkan organisasi keagamaan ikut memiliki andil dan peran yang sangat besar, seperti Muhammadiyah (1912) dan Nah-datul Ulama (1926) yang keduanya merupakan pengawal faham Islam mo-derat dan setia pada Pancasila. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari belasan ribu pulau dan memiliki keragaman bahasa, budaya dan agama, ikut serta melahirkan dinamika sosial budaya yang pengaruhnya sangat dirasakan masuk ke ranah politik.(Sukamto 2008) Sejak merdeka tahun 1945 sampai sekarang kita masih bingung mencari model, trial and error. Masyarakat Indonesia yang sedemikian majemuk me-merlukan waktu yang tidak pendek untuk membangun kohesi berbangsa dan bernegera. Kelahiran “Negara Indonesia” tidak serta-merta melahirkan “Bang-sa Indonesia” yang solid, karena “keindonesiaan” kita masih dalam proses menjadi. Kita belum memiliki tradisi yang kuat dan rasional dalam kehidupan bernegara dan berpemerintahan. Penegakan hukum dan kultur politik sangat mengecewakan sehingga mendevaluasi gerakan reformasi dan demokratisasi. Akibatnya, masyarakat semakin apatis dan kecewa terhadap parpol dan politik. Diduga, sentimen de-parpolisasi dan golput semakin meningkat secara signifikan. Sistim politik dan pemerintahan yang dibangun pasca Soeharto, yang dikenal dengan era reformasi, yang lebih menonjol adalah kebebasan berekspresi, pembatasan jabatan presiden dan desentralisasi. Menarik diperhatikan, terjadi kecenderungan menurunnya daya tarik keagamaan ketika diharapkan menjadi tenaga magnet untuk menarik massa.(Syarif 2013)

Parpol yang selama ini selalu dikaitkan dengan semangat dan ciri keagamaan, justru mengalami penurunan. Sementara itu, parpol yang dianggap nasionalis atau sekuler justru berusaha mengakomodasi dan mempromosikan nilai-nilai dan simbol keagamaan. Situasi ini mengingatkan kita pada slogan dan pemikiran yang pernah dilontarkan almarhum Nurcholish Madjid; Islam Yes, Partai Islam No. Tak heran jika parpol yang selama ini dianggap eksklusif sebagai pertain keagamaan mulai membuka diri untuk menerima kader yang berbeda keyakinan agamanya. Variabel lain yang membuat panggung politik kian tampak heboh dan sulit diprediksi adalah munculnya kekuatan opini lewat lembaga survey dan media sosial. Penggunaan televisi untuk mempersuasi massa masih tetap dianggap paling efektif sehingga muncul istilah telepolitics meskipun komunikasinya satu arah (one-way traffic communication). Iklan politik telah menjadi bagian dari industri kapitalis yang bergerak dalam bidang media sosial. (Ibn Mandhur 1999)

Hal ini sangat berkaitan dengan lembaga survey politik yang berusaha membentuk opini massa untuk memilih partai dan tokoh tertentu, sekalipun dengan mengorbankan otentisitas parpol dan tokohnya. Dengan kata lain, di samping adanya parpol, media massa tertentu telah mengalami metamorphosis menjadi aktor dan kekuatan politik yang efektif untuk membangun wacana dan opini. Obyektivitas pemberitaan semakin tergeser. Dalam konteks ini, Syafii Maarif, optimis Islam akan mampu memberi corak pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang berwawasan moral. Asalkan Islam dipahami secara benar dan realistis, tidak diragukan lagi akan berpotensi dan berpeluang besar untuk ditawarkan sebagai pilar peradaban alternatif di masa depan. Sumbangsih solusi Islam terhadap masalah kemanusiaan yang semakin lama semakin kompleks ini, baru punya makna historis bila umat Islam sendiri dapat tampil sebagai umat yang beriman.

Menyikapi tantangan tersebut, hal paling mendasar adalah bahwa umat Islam tidak boleh terpecah belah oleh dua kutub pemikiran: antara ilmu agama dan ilmu sekuler. Dengan bekal perpaduan spritual dan intelektual, maka posisi umat Islam yang semula berada di buritan, dimasa mendatang diharapkan menjadi lokomotif dalam membangun masyarakat bermoral

yang diback up kemantapan ontologi. Kalau mau menelusuri sejauhmana pengaruh Islam terhadap perpolitikan di Indonesia, akar sejarahnya boleh dikata cukup panjang. Wawasan moral tentang kekuasaan itulah yang dimaksud aspirasi Islam. (Muhammad Rijal Fadli 2020) Bagi Islam, apa yang bernama kekuasaan politik haruslah dijadikan “kendaraan” penting untuk mencapai tujuan Islam seperti: penegakkan keadilan, kemerdekaan, humanisme egaliter, yang berlandaskan nilai nilai tauhid. Bagaimanapun harus diakui bahwa Islam merupakan faktor yang teramat penting bagi partai-partai yang berasaskan Islam, seperti PPP dan PKS. Tanpa Islam, Partai Politik Islam akan eksis di bumi nusantara ini dan ilmu sekuler Dengan bekal perpaduan spritual dan intelektual, maka po-sisi umat Islam yang semula berada di buritan, dimasa mendatang diharapkan menjadi lokomotif dalam membangun masyarakat bermoral yang diback up kemantapan ontologi. Kalau mau menelusuri sejauhmana pengaruh Islam terhadap perpolitikan di Indonesia, akar sejarahnya boleh dikata cukup panjang. Wawasan moral tentang kekuasaan itulah yang dimaksud aspirasi Islam. Bagi Islam, apa yang bernama kekuasaan politik haruslah dijadikan “kendaraan” penting untuk mencapai tujuan Islam seperti: penegakkan keadilan, kemerdekaan, humanisme egaliter, yang berlandaskan nilai nilai tauhid. Bagaimanapun harus diakui bahwa Islam merupakan faktor yang teramat penting bagi partai-partai yang berasaskan Islam, seperti PPP dan PKS. Tanpa Islam, Partai Politik Islam akan eksis di bumi nusantara ini.

Kesimpulan

Islam politik di masa kerajaan-kerajaan adalah gerbang pembuka lahirnya kekuatan politik Islam. Para raja Muslim sangat berperan memainkan posisinya dalam mendukung proses Islamisasi. Masa ini juga menjadi penanda runtuhnya dominasi politik Hindu Budha, terhitung hanya secara kultur-budaya saja agama Hindu-Budha masih mendominasi pola keberagamaan Nusantara. Masa kolonial menjadi titik kemunduran politik Islam sebagai satu-satunya basis politik yang selama berabad-abad tetap eksis, kerajaan-kerajaan tidak dapat lagi membendung kolonialisme. Namun, ada sisi positif akibat lemahnya posisi raja Islam kala itu, yakni munculnya perlawanan terhadap penjajahan dari berbagai basis kekuatan Islam seperti:

para bangsawan, ulama dan rakyat jelata. Masing-masing kelompok ini mempunyai massa yang dapat digerakkan sewaktu-waktu. Masa ini juga pada akhirnya melahirkan berbagai organisasi Islam sebagai wadah perjuangan umat untuk menghadapi penjajahan, sehingga pada masa ini lahir Syarikat Islam, Muhammadiyah hingga Nahdhalatul Ulama.

Masa Orde Lama dan Orde Baru pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan untuk menata kekuatan ekonomi daripada politik. Politik Indonesia secara umum dan politik Islam secara khusus benar-benar dalam genggaman birokrasi dan militer. Umat Islam memang cenderung menampilkan resistensi dan kurang terlibat dalam proses pembangunan, umat Islam dalam hal ini berada dalam posisi marginal. Hubungan Islam dan negara dengan sendirinya menciptakan jarak karena disharmonisasi dan terkesan antagonis antar keduanya. Kondisi massa Islam pun terbelah dalam dinamika wacana Islam atau wacana kebangsaan yang berlarut-larut. Sebaliknya, masa reformasi dianggap menjadi titik kebangkitan umat Islam karena terjadi reformasi politik, akan tetapi perubahan tersebut tetap tidak mampu menyatukan institusi politik Islam. Partai-partai Islam yang banyak muncul hanya memperlebar disintegrasi politik sehingga pada masa ini justru umat Islam lebih memilih partai berideologi non-Islam. Hal ini terbukti dengan kemenangan partai politik pada Pemilu 1999 yaitu, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Pemilu 2004 Partai Golongan Karya (Golkar) dan Pemilu 2009 Partai Demokrat, masing-masing adalah partai nasionalis yang dapat memenangkan suara mayoritas ketimbang partai Islam.

Pustaka Acuan:

Abdul Karim. 2005. *Islam Dan Kemerdekaan Indonesia*. Yogyakarta: Nuansa Aksara.

Armansyah, Yudi. 2017. "Dinamika Perkembangan Islam Politik Di Nusantara: Dari Masa Tradisional Hingga Indonesia Modern." *FOKUS/ : Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 2(1): 8.

Bakhtiar Effendi. 1998. *Islam Dan Negara; Transformasi Pemikiran Dan*

- Praktik Politik Islam Di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Dhiauddin Rais. 2001. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Firdaus, A.N. 1997. *Syarikat Islam Bukan Budi Utomo Meluruskan Sejarah Pergerakan Bangsa*. Jakarta: Datayasa.
- Hatamarrasyid. 2008. *Politik Aliran Dan Posisi Partai Politik Islam Dalam Pemilu Di Indonesia*. Palembang: Ilmu Politik Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Raden Fatah.
- Ibn Mandhur. 1999. "Lisân Al Arab." *Bairut: Dâr Ihya al Turath al Araby* 6(1): 429.
- Ira M. Lapidus. 2000. *Sejarah Sosial Ummat Islam*. II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Joebagio, Hermanu. 2016. "Membaca Politik Islam Pasca Reformasi." *Jurnal Agastya* 6(1).
- M.Ikhwan. 2021. "Perkembangan Pemikiran Islam: Membaca Politik Islam Masa Nabi Dalam Konteks Partai Islam, *Jurnal TAPIS* Vol. 17 No. 1 Januari – Juni 2021, e-ISSN: 2655-6057. Diunduh Pada Hari Senin Tanggal 19 Desember 2022, Pukul 16.00 Wib." *Jurnal TAPIS* 17(1): 5.
- Marwati Djoned Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. 2019. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Grafiti Press.
- Muhammad Rijal Fadli. 2020. "PERGUMULAN PARTAI POLITIK ISLAM PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 4(1): 199.
- Musrifah Sunanto. 2010. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nor Huda. 2007. *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Ramlan Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Salim Ali al-Bahnasawi. 2002. *Salim Ali Al-Bahnasawi, Wawasan Sistem Politik Islam, (Jakarta: Pustaka AlKautsar), Cet. I*. Jakarta: Pustaka AlKautsar.
- Sartono Kartodirdjo. 1992. *Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sukamto. 2008. *Dinamika Politik Islam Di Indonesia Dari Masa Orde Baru Sampai Masa Reformasi*. Bandung: Enlightenment.
- Syarif, Zainuddin. 2013. "MASA DEPAN POLITIK ISLAM." *Millah* Vol. XIII(1): 10.
- Taufik Abdullah. 1991. *Sejarah Umat Islam Indonesia*. Majelis Ulama Indonesia.
- Yatim, Badri. 2007. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.